

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi SIMDA merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi Pemerintah Daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan (Pratama, 2017). Sistem Informasi Manajemen Daerah memiliki 26 aplikasi secara terpisah yang dapat digunakan di setiap SKPD dengan sistem *database* terintegrasi, sehingga output nya dapat digunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pelaporan keuangan serta memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, dan akurat dalam menunjang proses administrasi pemerintahan, pelaporan keuangan dan pelayanan masyarakat (Monica, Saerang, & Pangerapan, 2017). Menurut Djaja dalam (Budiman & Arza, 2013), Aplikasi SIMDA merupakan Aplikasi *database* yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP). Oleh karena itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplemntasikan Aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Yanto & Akfir, 2019).

Adapun tujuan pada pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yaitu (BPKP, 2021a):

1. Membantu Pemerintah Daerah membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja tata kelola yang baik dalam pengendalian transaksi sekaligus informasi yang memadai.
2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) bersifat generik atau dapat digunakan di seluruh Pemerintah Daerah supaya tidak perlu

mengembangkan aplikasi serupa dengan sumber daya yang *relative* tinggi.

3. Menyediakan *database* mengenai kondisi di daerah yang jauh lebih maju dari aspek keuangan, aspek daerah, kinerja daerah, aparatur daerah serta pelayanan publik yang bisa digunakan sebagai penilaian kinerja instansi Pemerintah Daerah.
4. Meningkatkan teknologi informasi dalam laporan keuangan daerah.

Manfaat yang diperoleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan Aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) sebagai berikut:

1. *Database* yang update, tidak perlu menginput secara berulang data yang sama
2. Data yang sama akan otomatis tervalidasi secara aman.
3. Fleksibel, menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan:
 - a. Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan
 - b. Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah dalam mengambil keputusan.

SIMDA diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan (BPKP, 2008) yaitu:

1. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan pemerintahan.
2. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan badan/Lembaga/dinas sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah; dan
3. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok dalam Pemerintah Daerah.

Kerangka unsur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP, 2008) yaitu:

1. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi, lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayan publik;

2. Portal, pelayanan publik, situs *website* pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengelolaan informasi dan dokumen elektronik beberapa instansi yang terkait;
3. Organisasi pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik; dan
4. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasaranan, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, transaksi dan penyaluran informasi.

Dengan komitmen dan dukungan dari pimpinan dan eksistensi BPKP maka pengembangan dan perbaikan Aplikasi SIMDA masih terus dilakukan meliputi (BPKP, 2021a):

1. Penyempurnaan dan Perbaikan Aplikasi SIMDA mengikuti praktik pengelolaan keuangan terbaik.
2. Penyesuaian dengan peraturan yang terbit kemudian
3. Pemeliharaan dan asistensi kepada pemerintah daerah yang mengimplementasikan.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Program Aplikasi SIMDA telah di implementasikan pada 440 Pemerintah Daerah dari 542 Pemerintah Daerah yang ada, terdiri dari (BPKP, 2021a):

Tabel 2.1 Data Implementasi Aplikasi SIMDA pada Pemerintah Daerah

No.	Jenis Implementasi	Jumlah Pemda	Pengembangan
1	SIMDA Keuangan	394 Pemda	<p style="text-align: center;">1) Penganggaran</p> <p>Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).</p> <p style="text-align: center;">2) Penatausahaan</p> <p>Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.</p> <p style="text-align: center;">3) Akuntansi dan Pelaporan</p> <p>Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca), Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.</p>

2	SIMDA BMD	403 Pemda	<p style="text-align: center;">1) Perencanaan</p> <p>Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.</p> <p style="text-align: center;">2) Pengadaan</p> <p>Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan.</p> <p style="text-align: center;">3) Penatausahaan</p> <p>Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.</p> <p style="text-align: center;">4) Penghapusan</p> <p>SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan dan Daftar Barang yang Dihapuskan</p> <p style="text-align: center;">5) Akuntansi</p> <p>Daftar Barang yang masuk Neraca (<i>Intracomptable</i>), Daftar Barang <i>Extra Comptable</i>, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.</p>
3	SIMDA Gaji	51 Pemda	<p>Aplikasi ini akan membantu pemda untuk memproses penggajian secara lebih cepat, akurat serta menghasilkan dokumen penggajian yang dapat diandalkan.</p>

			<p>Ouput dari aplikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>1) Daftar Gaji, Rapel, Gaji Terusan, Perhitungan Pajak.</p> <p>2) Daftar Pegawai.</p> <p>3) Register- register</p>
4	SIMDA Pendapatan	169 Pemda	<p>1) Pendataan</p> <p>Formulir Pendaftaran, Tanda Terima Pendaftaran, Kartu NPWP/RD, Daftar Wajib Pajak/Retribusi, Daftar SPTP/RD, dan Kartu Data.</p> <p>2) Penetapan</p> <p>Nota Perhitungan Pajak/Retribusi Daerah, SKP/RD (Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah), Daftar SPKP/RD, SKP/RD Tambahan, SKPD/R Kurang Bayar, SKP/RD Nihil, Daftar Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah dan Daftar Tunggalan Pajak/Retribusi Daerah</p> <p>3) Penatausahaan</p> <p>Laporan Penerimaan Harian, Laporan Realisasi Penerimaan, Kartu Piutang, Buku Pembantu Rincian Penerimaan per Obyek, STS (Surat Tanda Setoran) dan Buku Kas Umum.</p>
5	SIMDA <i>Integrated</i>	196 Pemda	
6	Dashboard Keuangan	5 Pemda	Aplikasi Simda Dashboard menyediakan informasi manajerial, seperti Laporan Realisasi Anggaran

			Pendapatan dan Belanja serta rasio-rasio keuangan pemerintah daerah dan per OPD, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan
7	Koneksi CMS	225 Pemda	Aplikasi SP2D Online merupakan aplikasi layanan perbankan untuk memperlancar proses pencairan SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening tujuan (rekening SKPD dan pihak ketiga) di Bank dengan konsep Real-Time Online. SP2D Online mempercepat proses pembuatan ID Billing Pajak dan Penyetoran Pajak ke Kas Negara untuk mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) untuk mempermudah Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran dengan mekanisme Transaksi Non Tunai (TNT). Rilis terbaru Aplikasi ini adalah CMS Versi 4
	Pemda Pengguna SIMDA	440 Pemda	

(Situs Resmi BPKP 2022, n.d.)

Seluruh program aplikasi SIMDA didukung dengan (SIMDA, 2019):

- Buku Manual Sistem dan Prosedur sesuai dengan jenis aplikasi
- Buku Pedoman Pengoperasian Aplikasi
- Panduan-panduan Pembantu lainnya, misalnya Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan, Modul Pengelolaan Barang Milik Daerah, Modul Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah, Panduan Administrator, Modul Pelatihan, dan lain-lain.

2.1.2 *Financial Management Information System (FMIS)*

Aplikasi SIMDA *Next-G* berbasis *website* atau lebih dikenal dengan *Financial Management Information System (FMIS)* merupakan hasil pengembangan Aplikasi SIMDA oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (BPKP, 2021b). Sistem Informasi Manajemen Keuangan mendukung otomatisasi dan integrasi proses pengelolaan keuangan publik termasuk perumusan anggaran, pelaksanaan (misalnya: kontrol komitmen, pengelolaan kas/utang, operasi perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan). Solusi SIMDA *Next-G* secara signifikan meningkatkan efisiensi serta kesetaraan operasi pemerintah, memberikan potensi besar untuk meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (BPKP, 2021a). SIMDA sudah melewati berbagai dinamika dan perkembangan. Diawali dengan SIMDA keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan, SIMDA Perencanaan, hingga SIMDA Gaji. Untuk selanjutnya, BPKP akan terus mengembangkan SIMDA *Next-G* berbasis web agar lebih sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan akuntabilitas (BPKP, 2021b).

Berikut ini urutan / siklus Perencanaan SIMDA *Next-G* (DPU, 2021):

- a. RPJMD berisi Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Program Pemerintah Daerah (Pagu Total merupakan pagu hasil akumulasi dari Renstra, Renja dan RKPD).
- b. Renstra berisi Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan terdapat Pagu Distribusi dari RPJMD.
- c. RKPD berisi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan untuk 1 tahun dan terdapat Pagu Distribusi dari Renstra.
- d. Renja berisi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan untuk 1 tahun untuk OPD tertentu terdapat Pagu Distribusi dari RKPD.
- e. RKA (Anggaran 1 Tahun untuk OPD) terdapat Pagu Distribusi dari Renja.
- f. DPA yang merupakan dokumen yang berisi rencana belanja sesuai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan selama 1 tahun.

2.1.3 Catatan Kekurangan Aplikasi SIMDA Next-G atau FMIS

Berdasarkan rutinitas yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah, biasanya SKPD telah sibuk dengan pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan yang rencananya di jadwalkan pada triwulan pertama tahun anggaran berjalan. Proses tersebut mengakibatkan arus pertanggungjawaban bukti belanja dari Uang Persediaan (UP) yang diterima dari BUD kepada masing-masing SKPD sebagai modal awal pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan bergerak maju sehingga Bendahara Pengeluaran dan PPK bekerja menghasilkan dokumen pertanggungjawaban yang nantinya akan tercatat sebagai realisasi belanja. Belum sempurnanya Sistem Penatausahaan pada SIPD yang dikelola oleh Kemendagri membuat banyak Pemerintah Daerah masih menggunakan SIMDA *Next-G* yang merupakan produk dari BPKP. Terdapat beberapa fitur pada SIMDA *Next-G* yang wajib mendapatkan prioritas dalam hal penyempurnaan dan pembaruan Sistem oleh Tim Pengembang (BPKP) guna menunjang operasional Pemerintah Daerah yang telah memasuki minggu pertama bulan Februari (Seputar Keuangan Daerah, 2022).

Dalam SIMDA FMIS terdapat 2 hal umum yaitu :

1. Fitur Data Entry
2. Fitur Review Laporan

Khusus untuk point satu diatas terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama tim pengembang yaitu (Seputar Keuangan Daerah, 2022):

1. Menu SKPD - Bendahara Pengeluaran Khususnya Pajak. Sampai pada minggu kedua bulan Februari 2022 Tim pengembang belum melakukan pembaruan terhadap fitur Pajak sehingga Bendahara Pengeluaran kesulitan dalam melakukan proses Input atas data pajak yang telah disetor.
2. Jumlah Karakter *Alfabeth* pada menu *entry* Bendahara Pengeluaran - Bukti GU / Bukti TU. Pada menu *entry* Bukti GU jumlah karakter pada *Tool*. Uraian masih terbatas sehingga beberapa bukti yang mempunyai uraian

cukup panjang tidak dapat di *entry* seluruhnya, hal ini membuat Bendahara Pengeluaran menyiasati dengan memberikan kode nomor kwitansi pada Uraian *entry* Bukti GU.

3. Data inputan pada menu Ketetapan Pendapatan di Bendahara Penerimaan tidak dapat dihapus jika telah status inputan telah "FINAL", harus ada fitur Ubah Status pada menu *Tool*.

Seiring berjalannya waktu dengan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan maka Bendahara Pengeluaran biasanya akan menjalani proses pemeriksaan kas oleh auditor, hal tersebut sangat berpengaruh jika fitur laporan pada SIMDA *Next-G* belum di *update* oleh tim pengembang. Setidaknya terdapat beberapa *report* yang harus mendapat perhatian khusus dan menjadi prioritas utama oleh tim pengembang antara lain adalah (Seputar Keuangan Daerah, 2022):

A. Laporan SKPD

- 1.Rincian SPJ / Register SPJ
- 2.Laporan pengawasan mutlak per Sub Kegiatan
- 3.Dokumen Kendali per Sub Kegiatan maupun Aktivitas
- 4.Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran
- 5.Pajak
- 6.BKU
- 7.Register STS
- 8.Register Bukti Penerimaan
- 9.Register SKP
- 10.Laporan Fungsional Bendahara Penerimaan

B. Laporan SKPKD

1. Register SP2D Rinci
2. Register SP2D Non Anggaran
3. Buku Pembantu Kas Daerah
4. Perbedaan dengan Simda v.2.9.0.9

Pada SIMDA V.2.9.0.9 khususnya pada menu anggaran, SIMDA *Next-G* tidak bisa melakukan *posting* per SKPD sedangkan untuk SIMDA V.2.9.0.9, *posting* anggaran dapat dilakukan per SKPD.

5. Anggaran Kas / Rencana Kas

Terkait dengan fitur Rencana Kas, masih terdapat kekurangan di mana pada SIMDA *Next-G* meskipun Rencana Kas belum final namun masih bisa dilakukan di *posting* anggaran.

6. Pendobolan data *entry* secara otomatis

Selain masih terdapat beberapa kekurangan yang belum di perbaiki pada SIMDA *Next-G*, masalah lain yang muncul adalah adanya pendobolan secara otomatis pada beberapa fitur *entry* data yaitu:

1. Realisasi Pencairan SP2D
2. Ketetapan Pendapatan

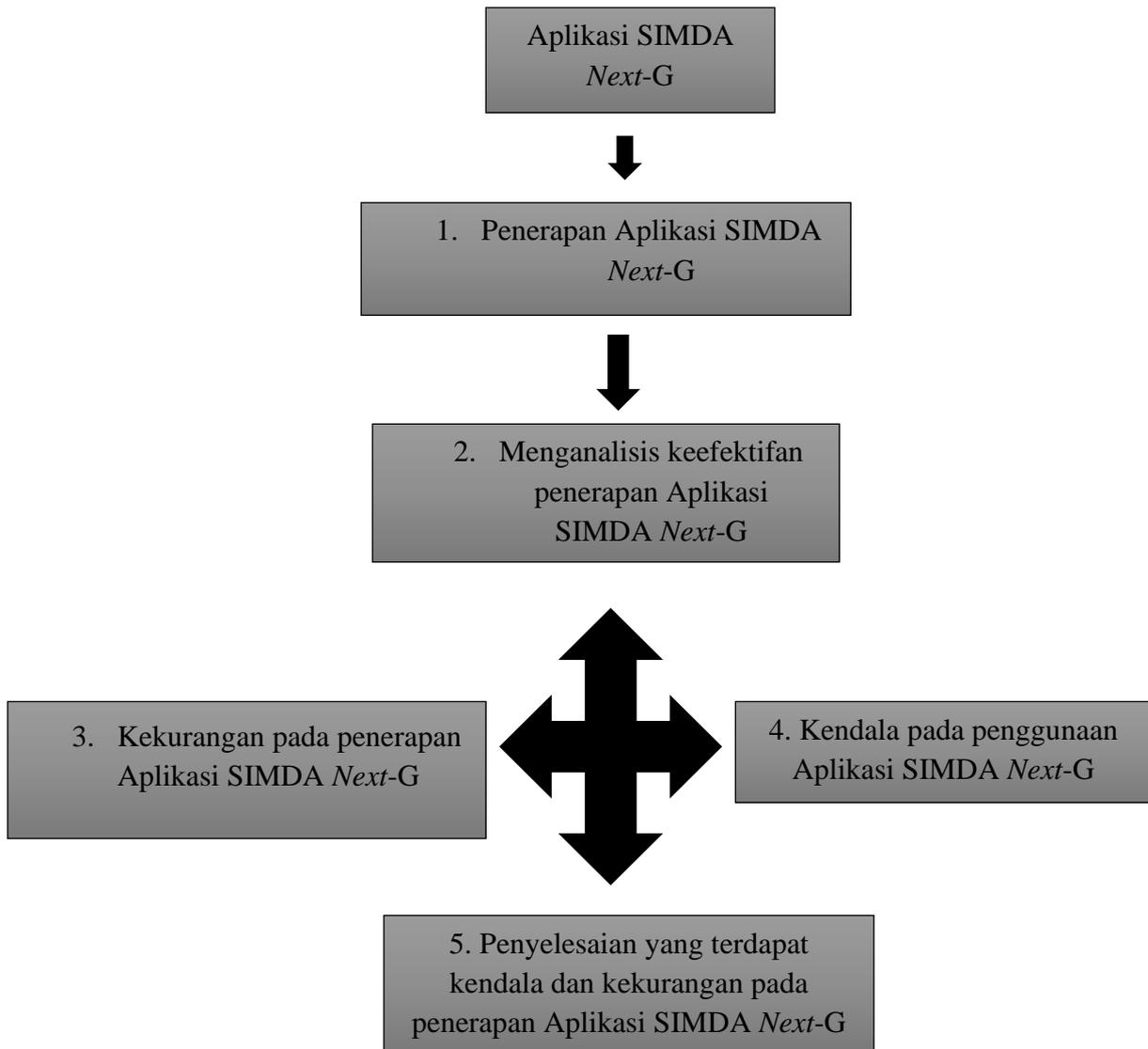
Masalah tersebut baru diketahui ketika muncul laporan dari petugas input Kas Daerah dan Operator Bendahara Penerimaan sehingga untuk sementara waktu diputuskan bahwa proses input Realisasi Pencairan SP2D dan Ketetapan Pendapatan ditangguhkan sampai dengan muncul perbaikan dan *update* oleh tim pengembang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
(Rakhmawati, 2022)	ANALISA SIMDA- NEXT GENERATION (SIMDA Next-G)	Dari segi sustainability, SIMDA Keuangan V.2.9.0.9 memberikan efektivitas sistem untuk pencatatan dan pelaporan transaksi yang lebih baik, karena aplikasi ini sudah stabil. Namun, dari segi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) SIMDA <i>Next-G</i> lebih baik, walaupun masih terus melalui update.

2.3 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 2.1 Model Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah pada penelitian ini yaitu:

Pada pemerintah daerah yang telah menggunakan Aplikasi SIMDA *Next-G* adalah Dinas BPKAD Kab.Kotabaru dan sudah berjalan pada tahun ke-2. Dalam penelitian ini kerangka pemecahan masalah untuk memperoleh informasi mengenai penerapan Sistem Aplikasi SIMDA *Next-G*, serta menganalisis penerapan Aplikasi

SIMDA *Next-G* maka akan mendapatkan informasi mengenai seberapa efektif dan efisien Aplikasi SIMDA *Next-G* pada Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotabaru. Selanjutnya dalam penerapan apakah terdapat kendala serta kekurangan pada penggunaan Aplikasi SIMDA *Next-G*, maka dari Gambar 2.1 didapat kerangka pemecahan masalah pada Aplikasi SIMDA *Next-G* di Dinas BPKAD Kab.Kotabaru.